



## **Analisis Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Sebagai Upaya Penurunan Kejadian Stunting Di Kota Padang**

**Evi Hasnita<sup>1)</sup>, Nurhayati<sup>2)</sup>, Oktavianis<sup>3)</sup>, Billy Harnaldo Putra<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Fort De Kock

<sup>4</sup>Prodi Farmasi, Universitas Fort De Kock

<sup>1,2,3,4</sup>Jl. Soekarno Hatta No.11, Manggis Ganting, Kec. Mandiangin Koto Selayan,  
Kota Bukittinggi, Sumatera Barat  
email : [evihasnita@fdk.ac.id](mailto:evihasnita@fdk.ac.id)

**Abstrak** : Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 angka balita stunting di Kota Padang sebesar 19,5%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu prevalensi stunting di Kota Padang 18,9 %, ini membuktikan adanya peningkatan sekitar 0,6%. Kenaikan yang terjadi menggambarkan masih perlu kerja keras bersama dalam penurunan angka stunting di Kota Padang. Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 sebagai upaya penurunan kejadian kasus stunting termasuk di Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting yang ditinjau dari pendistribusian bantuan yang diberikan oleh bapak asuh kepada sasaran stunting. Metode penelitian kualitatif dengan melakukan *indepth interview* dan observasi, informan dipilih secara *purposive sampling* sebanyak 8 orang yang terlibat dalam implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting. Komponen yang diteliti adalah *input* (kebijakan, sumber daya manusia, pembiayaan, metode), proses (pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi) dan *output* (capaian penurunan stunting). Hasil : komponen input ; adanya Modul BAAS sebagai pedoman pelaksanaan program, sumber daya manusia masih belum mencukupi, tidak ada dana khusus BAAS, dan sarana prasarana masih kurang. Komponen proses ; pendistribusian dilakukan sesuai dengan Modul BAAS, pendataan yang belum merata. Komponen output ; program bedah rumah sehat, pembangunan jambanisasi, sanitasi air bersih, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, baduta dan balita, adanya DASHAT dan pos gizi untuk edukasi stunting dan edukasi pengolahan bahan pangan yang akan dikonsumsi oleh anak stunting.

**Kata kunci** : kebijakan, stunting, implementasi, bapak asuh

**Abstract** : Based on the SSGI results in 2022, the stunting toddler rate in Padang was 19.5%. When compared to last year the prevalence of stunting in Padang City was 18.9%, this proves an increase of around 0.6%. The increase that occurred illustrates that we still need to work hard together in reducing the stunting rate in the city of Padang. Stunting Foster Children Program (BAAS) which is listed in Presidential Regulation Number 72 of 2021 as an effort to reduce the incidence of stunting cases, including in the city of Padang. The purpose of this study was to analyze the implementation of the Foster Fathers for Stunting Children program in terms of the distribution of assistance provided by foster fathers to stunting targets. The type of this research was Qualitative by conducting in-depth interviews and observations. The informants were selected by purposive sampling as many as 8 people involved in the implementation of the Foster Stunting Children program. The components studied are inputs (policies, human resources, financing, methods), processes (implementation and monitoring and evaluation) and outputs (stunting reduction achievements). Result: component input; the existence of the BAAS Module as a guideline for program implementation, human resources were still insufficient, there was no



## Analisis Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Sebagai Upaya Penurunan Kejadian Stunting Di Kota Padang

**Evi Hasnita<sup>1)</sup>, Nurhayati<sup>2)</sup>, Oktavianis<sup>3)</sup>, Billy Harnaldo Putra<sup>4)</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Fort De Kock Bukittinggi

*special BAAS fund, and infrastructure was still lacking. process component; distribution was carried out in accordance with the BAAS Module, data collection was not evenly distributed. output component; healthy home renovation program, construction of latrines, clean water sanitation, provision of supplementary food for pregnant women, toddlers and toddlers, the existence of DASHAT and nutrition posts for education on stunting and education on food processing that will be consumed by stunted children.*

**Keywords:** Policy, Stunting, Implementation, Foster Fathers

### PENDAHULUAN

Berdasarkan data *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) pada tahun 2017 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya di dunia adalah sekitar 36% dengan jumlah balita stunting adalah sebanyak 8,8 juta jiwa. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan, 2022), menunjukkan Indonesia merupakan peringkat ke-5 di dunia yang memiliki prevalensi balita stunting mencapai angka 30,8% artinya satu dari tiga balita di Indonesia mengalami stunting. Sementara, laporan dari *Asian Development Bank* ( Bank Pembangunan Asia ) menyatakan bahwa prevalensi anak usia di bawah lima tahun yang menderita stunting di Indonesia mencapai 31,8% dan merupakan negara tertinggi kedua di Asia Tenggara pada 2020 (Katadata, 2022). Pada tahun 2021 berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menyatakan prevalensi stunting di Indonesia lebih baik dibandingkan Myanmar (35%), tetapi masih lebih tinggi dari Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%) dan Singapura (4%). Karena secara nasional prevalensi angka stunting di Indonesia mengalami penurunan per tahunnya. Dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24,4% .

Sementara, (katadata.co.id, 2022) angka prevalensi stunting untuk Provinsi Sumatera Barat berada di atas toleransi *World Health Organization* (WHO), yaitu 20% pada tahun 2020, kecuali ada 3 Kota yang dikategorikan masih aman yaitu Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh. Berdasarkan data SSGI di tahun 2021, untuk wilayah Sumatera Barat, anak balita yang mengalami stunting sebanyak 23,3 %. Berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), Angka stunting Sumbar pada tahun 2021 sebesar 23,3 persen sudah berada di bawah rata-rata nasional. Namun, pada tahun 2022 mengalami kenaikan 1,9 persen menjadi 25,2 persen, sehingga saat ini berada di atas rata-rata nasional, yaitu 21,6 persen.(Kemenkes, 2023)

Beberapa wilayah di Sumatera Barat yang memiliki proporsi balita stunting, salah



satunya Kota Padang yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat. Tercatat berdasarkan data sebanyak 18,9 %. Sebelumnya, prevalensi stunting di Kota Padang tahun 2017 cukup tinggi mencapai angka 20,04 %. Pada tahun 2018 angka stunting ini mengalami penurunan yang signifikan yaitu di angka 7,65% atau 3.943 (Profil Kesehatan Kota Padang, 2018). Tahun 2019 naik kembali menjadi 9.6% atau 4.266 (Profil Kesehatan Kota Padang, 2019). Sementara, pada bulan Juni 2022 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyebutkan bahwa sebanyak 3.000 lebih balita beresiko stunting di Kota Padang, namun sebanyak 1.002 balita diantaranya stunting atau 18,9%. (padek.jawapos.com, 2022)

*Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama (kronis), sehingga kondisi ini mengakibatkan tinggi badan anak menjadi lebih rendah dibandingkan anak-anak dengan pertumbuhan yang baik seusianya. Pengaruh dari stunting ini akan berlangsung seumur hidup bahkan akan mempengaruhi generasi selanjutnya, disamping itu jika dibiarkan maka akan menurunkan kecerdasan kognitif anak dan menghambat produktivitasnya. Seorang balita yang mengalami stunting ataupun yang beresiko stunting disebabkan oleh multi faktor, tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi saja namun ada faktor lainnya. Diantara faktor lainnya adalah : Pola asuh yang kurang baik disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua mengenai gizi dan kesehatan, baik sebelum hamil, pada masa kehamilan maupun setelah melahirkan. Sehingga hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting dan 1 dari 10 anak mengalami gizi kurang. Kondisi saat ini masih banyak anak yang tidak mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga beresiko akan stunting. Asupan gizi yang baik didapatkan dari makanan yang tepat sesuai yang tersedia di daerah masing-masing. Gizi yang baik adalah pondasi penting bagi seorang anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terutama bagi mereka yang tumbuh dan berkembang di lingkungan rentan; Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-*Ante Natal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) *Post Natal Care* dan pembelajaran dini yang berkualitas; Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal; Kurangnya akses ke air



## Analisis Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Sebagai Upaya Penurunan Kejadian Stunting Di Kota Padang

**Evi Hasnita<sup>1)</sup>, Nurhayati<sup>2)</sup>, Oktavianis<sup>3)</sup>, Billy Harnaldo Putra<sup>4)</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Fort De Kock Bukittinggi

bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar (BAB) diruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih.

SSGI 2021 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan tidak hanya memberikan gambaran status gizi balita saja tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator intervensi spesifik maupun intervensi sensitif baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota yang telah dilakukan sejak 2019 dan hingga tahun 2024.

Gencarnya pemerintah dalam upaya penurunan angka stunting, memiliki tujuan positif untuk mengurangi dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang akan diakibatkan oleh stunting. Jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan untuk jangka panjang akibat buruk yang akan timbul adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.

Pertumbuhan stunting yang terjadi pada usia dini dapat berlanjut dan berisiko untuk tumbuh pendek pada usia remaja. Anak yang tumbuh pendek pada usia dini (0- 2 tahun) dan tetap pendek pada usia 4-6 tahun memiliki risiko 27 kali untuk tetap pendek sebelum memasuki usia pubertas, sebaliknya anak yang tumbuh normal pada usia dini dapat mengalami *growth faltering* pada usia 4-6 tahun memiliki risiko 14 kali tumbuh pendek pada usia pra-pubertas. Peluang untuk kejar tumbuh melampaui usia dini masih ada meskipun kecil, namun tetap memperhatikan faktor – faktor yang dapat mencegah terjadinya stunting, seperti gizi yang cukup, sanitasi lingkungan yang baik, dan pola asuh dari keluarga sendiri. (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2020)

Kebijakan pencegahan stunting di Indonesia sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dikaji oleh (Febrian & Yusran, 2021) tentang Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan stunting di Kota Padang belum optimal dilakukan, karena berbagai permasalahan. Seperti belum optimalnya



koordinasi pemangku kepentingan pada intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kedua, sosialisasi belum optimal dilakukan karena masih terbatasnya sosialisasi tentang gizi. Ketiga karena tumpang tindih terhadap program prioritas yang dilaksanakan. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sesuai dengan survey dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan kondisi angka stunting pada nasional sekitar 24,4% , dan pemerintah menetapkan pencapaian target penurunan angka kejadian stunting diangka 14% pada tahun 2024, oleh sebab itu diperlukan penurunan signifikan 2,7% setiap tahunnya.

Hal ini menjadi isu strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.(Tim Indonesiabaik.id, 2019). Berdasarkan tuntutan dari Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak *Stunting* rentang periode 2018-2024 bahwa dalam pelaksanaan Percepatan Pencegahan Anak *Stunting*, dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan fasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut serta pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota. Untuk itu, Pemerintah Kota Padang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyukseskan penurunan angka stunting sampai mencapai target dibawah angka 14% pada tahun 2024. Dengan target yang ada, Pemerintah Kota Padang melakukan koordinasi bersama BKKBN, Kantor Wilayah DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI, 2022), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dan BAZNAS untuk aktif menjalankan sebuah program yang dipelopori oleh BKKBN dengan diterbitkannya Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun2021-2024 dan pihak dari BKKBN juga mengharapkan seluruh *stakeholder* terkait untuk dapat terlibat aktif pada Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), sehingga diharapkan bisa membantu secara langsung anak dengan resiko stunting. (Algamar Arif Safitra, 2023)

Menindaklanjuti program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), Pemerintah Kota Padang mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dari BKKBN



## Analisis Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Sebagai Upaya Penurunan Kejadian Stunting Di Kota Padang

**Evi Hasnita<sup>1)</sup>, Nurhayati<sup>2)</sup>, Oktavianis<sup>3)</sup>, Billy Harnaldo Putra<sup>4)</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Provinsi Sumatera Barat untuk menentaskan stunting di Kota Padang senilai 8,6 miliar rupiah. Diharapkan nantinya dengan adanya program BAAS menjadi langkah baik untuk menurunkan angka stunting di Kota Padang, melalui sinergitas dan keterlibatan para pemangku kepentingan baik kesehatan serta lintas sektor juga sangat membantu BKKBN dalam meningkatkan gizi anak yang memiliki masalah dalam tumbuh kembang. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji, terkait BKKBN meluncurkan program BAAS untuk menurunkan angka stunting. (Robby Sandes, 2022).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam upaya menurunkan kejadian stunting di Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) sehingga menghasilkan deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2023. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi/lembaga yang berkaitan dengan Program Bapak Asuh Anak Stunting di Kota Padang. Informan yaitu pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Peneliti memilih sebanyak 8 orang dan atau lembaga yang relevan dalam memberikan informasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi. Data yang didapatkan nantinya akan dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tema I Kebijakan**

Berdasarkan data akhir SSGI (Hasil Survei Status Gizi Indonesia) 2022 stunting di Kota Padang sekitar 19,5 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 18,9 % *trend* ini mengalami kenaikan yang signifikan. Selain itu, berdasarkan data PPGBM 13,1 % per bulan Mei 2023.

Untuk Kebijakan yang dicanangkan oleh BKKBN saat ini sudah sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 dan seluruh pedoman pelaksanaan program BAAS tertera dalam buku panduan yang berbentuk Modul BAAS. Implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang masih berjalan di tingkat sektoral Dinas Kesehatan beserta jajarannya dan belum ada koordinasi antar lintas sektoral dengan instansi lain yang



membahas khusus tentang pencegahan stunting. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang disebabkan oleh regulasi, dimana regulasi yang ada belum memiliki kejelasan fungsi dan tugas pokok dari lembaga yang terlibat, serta belum adanya kesadaran saling membantu dalam percepatan pencegahan stunting secara bersama.

Program BAAS yang dicanangkan oleh BKKBN ini adalah bentuk gotong royong, kesukarelaan instansi, sekelompok atau perorangan untuk menjadi bapak asuh yang akan memberikan asuhan berupa bantuan kepada sasaran yang diprioritaskan sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 yaitu keluarga yang memiliki remaja, ibu hamil, baduta atau balita yang bisa dikatakan kurang sejahtera dan tidak memiliki lingkungan yang sehat seperti jambanisasi dan air sanitasi yang sehat. Program BAAS merupakan bentuk upaya BKKBN dalam mengajak seluruh *stakeholder* baik lintas program maupun lintas sektor untuk bersama-sama bertanggung jawab menyelamatkan generasi agar terbebas dari stunting.

Kebijakan bukan sekedar tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu. Sementara itu kebijakan berarti suatu proses yang di dalamnya mencakup tahapan implementasi dan evaluasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran tertentu.

Berdasarkan penelitian oleh Febby Febrian dan Rahmadani Yusran (Febrian & Yusran, 2021) terkait dengan kebijakan haruslah ada koordinasi yang bagus antar lembaga pemerintah di setiap tingkat. Hal ini merupakan cara yang strategis dalam mencapai tujuan yang diinginkan, mengingat kejadian stunting disebabkan oleh berbagai aspek. Adapun keterlibatan multi sektoral tersebut terdiri dari sektor kesehatan, ketersediaan pangan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, serta jaminan sosial, selain itu juga sebagai salah satu langkah percepatan penurunan stunting di suatu daerah.

Sementara jika dilihat dari Jurnal Narayan J, John D, Ramadas N. *Malnutrition in India* (Narayan J, John D, 2019) di India sendiri untuk program pemerintah sudah berjalan dengan lancar namun masih tetap dibutuhkan pengetahuan yang lebih efektif lagi untuk penurunan stunting. Selain itu dilihat dari decade terakhir angka stunting di India sudah mulai mengalami penurunan.

Menurut peneliti dalam menjalankan kebijakan ini harusnya tidak ada perubahan



## Analisis Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Sebagai Upaya Penurunan Kejadian Stunting Di Kota Padang

**Evi Hasnita<sup>1)</sup>, Nurhayati<sup>2)</sup>, Oktavianis<sup>3)</sup>, Billy Harnaldo Putra<sup>4)</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Fort De Kock Bukittinggi

aturan di tengah pelaksanaan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan bagi pihak mana saja. Kemudian untuk instansi atau perorangan yang menjadi bapak asuh memiliki surat perjanjian yang ditandatangani sebagai bukti tanggung jawab. Selain itu, karena kebijakan baru berjalan selama 2 tahun, maka hasil yang diharapkan belum terpenuhi, namun untuk pendataan sudah dilakukan dengan baik, terbukti dari penambahan kasus stunting di Kota Padang sendiri.

### **Tema II Metode**

Metode yang diterapkan di lapangan sesuai dengan pedoman modul BAAS yang difokuskan untuk bantuan prioritas pemenuhan gizi dan perbaikan pola hidup, lingkungan dan sanitasi terhadap anak stunting dan keluarga stunting, memang bervariasi manfaat yang diberikan oleh bapak asuh. Karena bapak asuh memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya.

Metode yang dilakukan dalam memberikan manfaat kepada sasaran program BAAS ini beragam. Melalui program bedah rumah sehat, program pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, balita dan baduta, program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), dan program pos gizi. Jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.

Metode (*method*), secara harfiah berarti cara. Metode atau metodik berasal dari bahasa Yunani, *metha* (melalui atau melewati), dan *hodos* (jalan atau cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, metode juga diartikan sebagai sebuah teknik, prosedur, dan juga langkah untuk melakukan sesuatu dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari sifatnya sendiri, metode ini bersifat khusus, karena hanya berkaitan dengan teknik saja. (SPADA UNS, 2021)

Berdasarkan penelitian (Silva, 2016) penurunan stunting dilakukan pemerintah desa lewat bidan desa terus meninjau seorang bayi yang menderita stunting agar kedepannya bisa meningkatkan kesehatan gizi bayi. Besar harapan dari pemerintah desa agar kebijakan pencegahan stunting ini cepat terealisasi pada program desa periode selanjutnya setelah sejauh ini dalam proses perencanaan. Sementara itu Ada dua program penurunan stunting yang akan dilakukan pemerintah dalam menangani masalah ini. Program pertama adalah pengadaan software yang berisi program penurunan stunting.



Pembuatan *software* ini digawangi Direktorat Kesehatan Masyarakat. Program kedua melibatkan puskesmas, yang fungsinya menjadi preventif dan promotif bukan kuratif.

Menurut saya metode yang digunakan sebagai langkah preventif atau pencegahan sudah berjalan dengan baik. Karena sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga), maka bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan sasaran yang terdata.

### **Tema III Sumber Daya Manusia**

Untuk Sumber Daya Manusia dalam implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting, sudah berjalan cukup baik. Karena TPK sudah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan pelatihan orientasi TPK yang diberikan oleh DP3AP2KB, adanya rembug stunting, biaya akomodasi dan evaluasi untuk mengetahui kendala TPK di lapangan.

TPK (Tim Pendamping Keluarga) disetiap wilayah kerja difasilitasi dengan pelatihan seperti orientasi TPK oleh DP3AP2KB untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan TPK yang akan bekerja di lapangan mendampingi keluarga secara langsung selain itu mereka juga mendapatkan biaya akomodasi tiap bulannya. Adapun SDM dimasing-masing kecamatan beragam jumlahnya, namun ketetapannya Tim Pendamping Keluarga terdiri dari bidan atau tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader keluarga berencana (KB). Mereka sudah mendapatkan pelatihan dan dilakukan evaluasi dan monitoring disetiap bulannya.

Berhasilnya sebuah organisasi baik kecil atau besar, semata-mata bukan hanya ditentukan oleh kuantitas sumber daya manusia (SDM) saja, namun ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusia yang mampu melaksanakan peran dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang dijalankan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan kemampuan terpadu yang meliputi daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya yang dipengaruhi oleh keturunan (internal) maupun lingkungannya (eksternal). Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan sebuah aset dalam semua aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi atau mewujudkan suatu tujuan sehingga tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan kontunuitas. (Dr.Ir. Benjamin Bukit, 2017)



## Analisis Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Sebagai Upaya Penurunan Kejadian Stunting Di Kota Padang

**Evi Hasnita<sup>1)</sup>, Nurhayati<sup>2)</sup>, Oktavianis<sup>3)</sup>, Billy Harnaldo Putra<sup>4)</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Berdasarkan penelitian oleh Gina Muthia, Edison, Eny Yantri (Muthia et al., 2020) tentang sumber daya manusia untuk program intervensi gizi spesifik di Puskesmas Pegang Baru masih kurang untuk tenaga gizi, Kegiatan-kegiatan dalam intervensi gizi spesifik memerlukan koordinasi dengan lintas program seperti KIA ibu, KIA anak, gizi, promkes, imunisasi dan kesehatan lingkungan.

Menurut peneliti Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam sebuah instansi atau kebijakan dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena sumber daya manusia itulah yang punya andil lebih besar untuk mengendalikan faktor yang lain. Sumber daya manusia ini yang menentukan perkembangan dan jalannya sebuah kebijakan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah kebijakan atau sistem sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dan untuk sumber daya manusia seperti TPK (Tim Pendamping Keluarga yang diharapkan mampu melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan dari bantuan yang diberikan bapak asuh di lapangan masih belum mencukupi. Namun, mereka tetap berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diamanahkan. Selain itu mereka juga mendapatkan fasilitas seperti mengikuti pelatihan setiap tahun dan biaya transportasi.

### **Tema IV Dana**

Untuk dana, program ini tergantung dengan keinginan dari bapak asuh yang akan memberikan bantuan kepada sasaran yang ada. Hal terpenting sesuai dengan regulasi yang ada sesuai dengan Modul BAAS yang dikeluarkan oleh BKKBN.

Tidak ada alokasi dana khusus untuk program BAAS. Dana berasal dari bapak asuh yang bersangkutan. Dan untuk bantuan dikerekomendasikan diberikan selama 6 bulan. Bentuk bantuan pun beragam, tidak hanya dana, namun juga pembangunan bedah rumah sehat, jambanisasi, sanitasi air bersih dan bantuan pangan.

Informasi yang disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting BKKBN Wilayah Sumatera Barat, dana yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan program untuk penurunan stunting ini ada melalui DAK pemberian makanan tambahan lokal itu dari Kementerian Kesehatan pusat itu cukup besar yaitu sekitar Rp 50 miliar untuk Sumatera Barat, dari dana desa dalam plotingnya pemberian makanan tambahan, dari Kementerian Sosial melalui PKH (Program Keluarga



Harapan), dan dari APBD murni. Dalam hal ini, berbeda dengan program Bapak Asuh Anak Stunting, dana berasal dari bapak asuhnya sendiri, namun pemberian dana sesuai dengan aturan yang tertera pada Modul BAAS yang diterbitkan oleh BKKBN.

Berdasarkan penelitian Gina Muthia, Edison, Eny Yantri (Muthia et al., 2020) Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dijelaskan bahwa pembiayaan kegiatan di puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ketersediaan dana untuk kegiatan yang ada dalam program intervensi gizi spesifik sudah mencukupi karena jumlah dana BOK yang disediakan oleh pemerintah cukup besar.

Sementara itu, bantuan untuk menekan kejadian stunting juga bisa dalam bentuk pemberian makanan tambahan yang anggarannya berasal dari swadaya masyarakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fuat Khafifi (Fuat Khafifi, 2022) terkait dengan program pemberian makanan tambahan dalam penanganan stunting di Desa Pagerejo dimana kegiatan pendistribusian program PMT yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai pemenuhan kebutuhan gizi pada baduta terindikasi stunting. Untuk pengolahan PMT yang dilakukan oleh mahasiswa adalah menyelenggarakan kegiatan memasak bersama. Kemudian dalam pendistribusian mahasiswa juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang makanan tambahan dan manfaatnya.

Menurut peneliti, untuk pemberian asuhan yang dilakukan oleh bapak asuh memang beragam. Baik dalam bentuk uang, produk/bahan pangan maupun dalam bentuk bantuan pembangunan rumah, jambanisasi dan sanitasi air bersih. Disini, bantuan lebih cepat terdistribusi dibandingkan dengan dana yang berasal dari APBN, DAK, bantuan dari berbagai macam dinas dan kementerian, karena butuh waktu yang cukup lama dari segi pencairannya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan data akhir SSGI (Hasil Survei Status Gizi Indonesia) 2022 stunting di Kota Padang sekitar 19,5 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 18,9% *trend* ini mengalami kenaikan yang signifikan.

## **Tema I Kebijakan**



## Analisis Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Sebagai Upaya Penurunan Kejadian Stunting Di Kota Padang

**Evi Hasnita<sup>1)</sup>, Nurhayati<sup>2)</sup>, Oktavianis<sup>3)</sup>, Billy Harnaldo Putra<sup>4)</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Kebijakan mengenai implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sudah terlaksana dengan baik dalam hal penurunan kejadian stunting di Kota Padang, yaitu program PMT, DASHAT, pos gizi, bantuan bahan makanan, penyuluhan, pembangunan rumah dan jamban sehat, serta sanitasi air bersih sesuai dengan modul BAAS yang dicanangkan oleh BKKBN dan Perpres nomor 72 tahun 2021 namun belum optimal. Mulai dari pendataan, penyaluran, penerimaan, pencatatan dan pelaporan serta evaluasi telah diupayakan dijalankan semaksimal mungkin. Selain itu, terjalannya kerjasama yang baik antara lintas sektor dan lintas program yang dilakukan oleh pihak BKKBN Sumatera Barat dalam upaya menurunkan kejadian stunting di Kota Padang.

### **Tema II Metode**

Dalam metode penyaluran bantuan dari Bapak Asuh kepada Anak atau keluarga yang beresiko stunting dilakukan secara sistematis dengan bentuk manfaat yang berbeda-beda. Selain itu, saat ini pun untuk penyalurannya masih ada keterlambatan sampai kepada penerima manfaat BAAS. Sistematis yang dimaksud seperti mulai dari bapak asuh memberikan bantuan kepada tim PPS tingkat kecamatan, kecamatan ke kelurahan, kelurahan kepada TPK setempat, TPK menyalurkannya ke sasaran. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, pangan/ bahan makanan, dan pembangunan rumah sehat, jambanisasi, dan sanitasi air bersih, dan lainnya.

### **Tema III Sumber Daya Manusia**

TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang diberdayakan dalam mensukseskan program BAAS di Kota Padang berjumlah 1.467 orang dari 104 kelurahan yang ada. Setiap TPK terdiri dari 3 orang diantaranya bidan atau tenaga kesehatan, kader PKK dan kader keluarga berencana. Sementara, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari TPK, mereka diberikan pelatihan dan orientasi TPK oleh instansi yang bersangkutan serta diberi operasional sebagai motivasi bekerja dilapangan.

Selain itu, kendala yang ada yaitu terkait pendataan yang masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang masih belum bisa diajak berkoordinasi dan bersifat dinamis.

### **Tema IV Dana**

Untuk dana bersumber dari bapak asuh dan tidak ada dana khusus, bahkan ada dana



dari swadaya masyarakat seperti pos gizi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting BKKBN, instansi yang menjadi bapak asuh, TPK, dan sasaran yang bersedia berkoordinasi dengan peneliti, seterusnya pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam proses pelaksanaan penelitian.

## REFERENSI

- Algamar Arif Safitra. (2023). *Percepatan Laju Penurunan Stunting Sumbar, Wagub Audy Kumpulkan Seluruh Stakeholder*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. <https://sumbarprov.go.id/home/news/22509-percepatan-laju-penurunan-stunting-sumbar-wagub-audy-kumpulkan-seluruh-stakeholder#:~:text=Berdasarkan data Survey Status Gizi,%2C yaitu 21%2C6 persen.>
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. (2020). *Fasilitasi Dukungan Kegiatan Untuk Intervensi Stunting Di Sumatera Barat Melalui Video Conference*. Sumbarprov.Go.Id. <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/163-fasilitasi-dukungan-kegiatan-untuk-intervensi-stunting-di-sumatera-barat-melalui-video-conference.html>.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan. (2022). *Indonesia Peringkat 5 di Dunia, Stunting disebut Bukan Hanya Urusan Pemerintah*. Narasi *Tunggal*. <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. (2022). *Wujudkan Sumatera Barat Bebas dari Stunting Melalui Penyaluran APBN yang Responsif untuk Pembangunan Inklusif*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2954-wujudkan-sumatera-barat-bebas-dari-stunting-melalui-penyaluran-apbn-yang-responsif-untuk-pembangunan-inklusif.html>
- Dr.Ir. Benjamin Bukit, M. dkk. (2017). *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA*



Analisis Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)  
Sebagai Upaya Penurunan Kejadian Stunting Di Kota Padang

**Evi Hasnita<sup>1)</sup>, Nurhayati<sup>2)</sup>, Oktavianis<sup>3)</sup>, Billy Harnaldo Putra<sup>4)</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Fort De Kock Bukittinggi

*MANUSIA Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi* (Arypena (ed.); 1st ed.). Zahir Publishing.

Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21 <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214> Fuat

Khafifi, D. (2022). *Program Pemberian Makanan Tambahan Dalam Upaya Penangananstunting Di Desa Pagerejo Kec. Kertek Kab. Wonosobo.Vol 2 No.3.*

Katadata.co.id. (2022). *ini-wilayah-sumatra- barat- dengan-prevalensi-balita- stunting- terbesar-pada-2021.* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/20/ini-wilayah-sumatra-barat-dengan-prevalensi-balita-stunting-terbesar-pada-2021>

Katadata. (2022). *Prevalensi Stunting Balita Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN.* Kata Data.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/>

Kemenkes. (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. *Kemenkes*, 1–7. Muthia, G., Edison, E., & Yantri, E. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Ditinjau dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pegang Baru Kabupaten Pasaman. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(4),100–108.<https://doi.org/10.25077/jka.v8i4.1125>

Narayan J, John D, R. N. (2019).*Malnutrition in India: status and government initiatives. J Public Health Policy.*1,126–141.<https://doi.org/10.1057/s41271-018-0149-5>

Padek.jawapos.com. (2022). *Menjelaskan dari data Kemen terian,1.002 anak yang menderita stunting.* Padek.Jawapos.Com. [https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/01/09/2022/1-002-anak-di-padang-idapstunting/#:~:text=Ia menjelaskan%2C dari data Kemen terian,1.002 anak yang menderita stunting.](https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/01/09/2022/1-002-anak-di-padang-idapstunting/#:~:text=Ia%20menjelaskan%2C%20dari%20data%20Kemen%20terian,1.002%20anak%20yang%20menderita%20stunting.)

Robby Sandes. (2022). *Pemkot Padang Cari Bapak Angkat untuk Turunkan Stunting.* Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretarian Wakil Presiden. <https://stunting.go.id/pemkot-padang-cari-bapak-angkat-untuk-turunkan-stunting/>

Silva, M. B. (2016). Percepção da população assistida sobre a inserção de estudantes de medicina na Unidade Básica de Saúde.